

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Serta dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu beserta konsep yang terkait adalah sebagai berikut:

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Ni Putu Yunita Anggreswari dan A.A Raka Jayaningsih tentang “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Hidden Canyon Beji Guwang*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan proses pemberdayaan menurut Sulistyani dan Teguh yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual yang dikolaborasikan dengan 4 proses pemberdayaan Wilson meliputi *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using*.

Pertama, tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak *Hidden Canyon* melakukan dialog dengan masyarakat terkait dengan visi dari *Hidden Canyon* sendiri bahwa penyerapan tenaga kerja akan 100

persen dari masyarakat Guwang sehingga profesionalisme sedikit diabaikan. Dengan memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat maka masyarakat akan tersadar mengenai kebutuhannya akan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kapasitas dirinya. Implementasi tersebut juga merupakan proses pertama pada proses pemberdayaan yang meliputi *awakening* atau penyadaran Wilson yang mana pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.

Kedua adalah tahapan transformasi kemampuan (*understanding*) berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Dalam tahapan ini demi meningkatkan kemampuan berbahasa asing para *guide* dan pekerja lokal, kepala desa yang berkolaborasi dengan pihak pengelola objek wisata alam desa Guwang mengadakan pelatihan berbahasa Inggris. Pelatihan diadakan secara berkala dengan mendatangkan para guru yang ahli dibidangnya. Pemerintah Desa Guwang juga memberikan pelatihan 3S yaitu Senyum, Salam dan Sapa serta memberikan pembekalan terhadap informasi-informasi yang akan mereka sampaikan ketika melayani wisatawan. Dengan diadakannya pelatihan ini tentu akan meningkatkan keterampilan dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan wisatawan serta meningkatkan *service* atau pelayanan dari *guide* kepada wisatawan.

Pelatihan lainnya adalah pelatihan yang diadakan oleh Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Gianyar yang memberikan pelatihan terkait dengan cara dan strategi dalam menanggulangi bencana dan penyelamatan kepada

wisatawan sehingga tentu akan berpengaruh kepada rasa aman yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata *Hidden Canyon*. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari tahapan *harnessing* pada proses pemberdayaan yakni tahapan mengenai pemberdayaan, pada tahapan ini mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya Wilson.

Ketiga merupakan tahapan terakhir adalah tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif. Pada tahapan ini pihak *Hidden Canyon* melaksanakan pelatihan rutin agar semakin terasah kemampuan guide dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, dalam tahapan ini pelatihan bahasa asing yang diberikan tidak saja bahasa Inggris namun juga bahasa Mandarin dan Jepang, pelatihan akan diadakan secara berkala sehingga kemampuan dari para guide semakin matang seiring dengan semakin berkembangnya objek wisata *Hidden Canyon*. Dengan penggunaan kemampuan pada kehidupan sehari-hari, maka tahapan ini merupakan proses *using* pada proses pemberdayaan Wilson yang menyatakan bahwa tahap *using* adalah ketika menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Penelitian kedua dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan Dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antarpribadi*”. Oleh Rini Rinawati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan proses pemberdayaan Wilson yang berkaitan dengan proses *awakening*, *understanding*, *harnessing*, dan *using*. Pada proses penyiapan masyarakat menjadi kegiatan untuk mengetahui program

---

<sup>32</sup> Ni Putu Yunita Anggreswari, dan A.A Raka Jayaningsih. “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Hidden Canyon Beji Guwang*”, Vol. 4 Nomor 1, 2018.

yang ada termasuk (PNPM Mandiri P2KP) dan mengetahui kondisi lingkungan sendiri yang menurut Wilson disebut sebagai proses *awakening* (proses mengenali dirinya/penyadaran).

Pengetahuan yang sudah dimiliki tersebut menjadi dasar kesadaran subjektif dari perempuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP. Pengetahuan yang diperoleh pada gilirannya akan menentukan *because of motive* (motif pendorong) dan *in order to motive* (motif harapan/tujuan) dari perempuan untuk berpartisipasi pada kegiatan PNPM Mandiri P2KP. Tahapan proses ini pada akhirnya menumbuhkan pemahaman dalam diri perempuan yang oleh Wilson disebut sebagai *understanding*. Sedangkan proses *understanding* adalah proses pembelajaran perempuan dalam kegiatan pemberdayaan melalui PNPM Mandiri P2KP.

Proses penyiapan masyarakat yang dilanjutkan dengan perencanaan masyarakat menjadikan perempuan memiliki kerbagai pengetahuan termasuk keterampilan melalui pelatihan relawan sehingga perempuan menjadi sadar dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Proses ini menurut Wilson dinamakan dengan *harnessing* (kesadaran dengan memiliki keterampilan). Proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam tridaya pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan asumsi Wilson dengan menamakan proses *using*.

Proses *using* dipahami oleh Wilson sebagai kegiatan menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh keberdayaan. Proses pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP yang pada akhirnya melahirkan

keberdayaan dengan melihat pada proses di lapangan dan dikaitkan dengan proses pemberdayaan sebagaimana dipahami oleh Wilson.<sup>33</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tukasno tentang *“Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur)*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan siklus dan proses pemberdayaan Wilson yang di kolaborasi dengan tingkat pemberdayaan dan indikator dari Fujikake untuk mengetahui hasil dari program.

Pada proses pemberdayaan Wilson *awakening* (penyadaran) dilihat dari dilakukannya sosialisasi program pemberdayaan (PNPM-MPd) Rangkaian kegiatan sosialisasi berikutnya adalah Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), yaitu menghimpun masyarakat untuk memutuskan menerima atau menolak program pemberdayaan masyarakat PNPM-MPd di desanya dan berfungsi sebagai pembelajaran awal bagi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MPd. Pada tahapan ini masyarakat memasuki tahap awal siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat telah memiliki keinginan untuk berubah. Sosialisasi selanjutnya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui siklus pemberdayaan dalam program PNPM-Mandiri Perdesaan.

Selanjutnya adalah pelatihan yang pada dasarnya adalah pelatihan motivasional yaitu pelatihan yang mendorong peserta mempunyai paradigma dan

---

<sup>33</sup> Rini Rinawati. *“Pemberdayaan Perempuan Dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antarpribadi”*, ISSN: 2089-3590, 2010.

sikap mental positif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Berkaitan pada hal tersebut terdapat aspek cara pandang masyarakat yang menyangkut pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek pemberdayaan, serta terdapat penekanan dari pentingnya partisipasi dan kemauan masyarakat dalam kegiatan. Hal tersebut masuk pada proses *understanding* (pemahaman akan program).

Kemudian pada tahap *harnessing* (pemanfaatan) ini meliputi kepedulian dan kerjasama, kerja kelompok, pengambilan tindakan, penyampaian opini dan mengemukakan pendapat. Pada tahap *using* (menggunakan) dilihat pada perubahan kesadaran, kreativitas, pemecahan masalah, penyusunan tujuan baru, negosiasi, kepuasan, memanfaatkan dana, keterampilan manajerial, kepercayaan diri dan pengambilan keputusan.<sup>34</sup>

Penelitian keempat tentang “*Analisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Masyarakat Kota Malang)*”. Oleh Yohan Irawan, Nafiqoh, dkk. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan/proses pemberdayaan Wilson yang meliputi penyadaran (*awakening*), pemahaman (*undestanding*), pemanfaatan (*harnessing*), dan *using* (penggunaan/pembiasaan).

Pada tahap penyadaran (*awakening*), BKM Tlogomas melakukan dengan cara membentuk tim relawan. Tim relawan ini adalah masyarakat yang bersedia

---

<sup>34</sup> Tukasno. “*Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur)*”, Vol. 3 Nomor 2, 2013.

langsung untuk membantu BKM yang kemudian mensosialisasikan di seluruh RT/RW yang ada dan mendampingi masyarakat dengan melakukan pendekatan personal secara perlahan tentang adanya bantuan pemerintah yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahap yang kedua adalah tahap pemahaman (*understanding*). Tahap ini dilakukan dengan cara membentuk KSM-KSM yang kemudian setiap koordinator dari KSM yang ada memberikan pemahaman mulai dari pengajaran pembuatan dan pengajuan proposal untuk pengajuan dana sesuai dengan kebutuhan setiap KSM. Setelah itu pengajuan tersebut ditampung terlebih dahulu dan menunggu turunnya BLM dan mengadakan musyawarah dengan masyarakat tentang prioritas yang harus dijalankan.

Pada tahap yang ketiga adalah tahap pemanfaatan (*harnessing*), yaitu memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dengan cara melakukan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Namun sebelum adanya pelatihan memperkuat kemampuan BKM terlebih dahulu serta meningkatkan kapasitas *stakeholder* yang ada. Pelatihan ini dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan dengan cara mendampingi setiap pengurus BKM dan juga mendatangkan narasumber dari akademisi yang berkompeten dalam bidangnya. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan ternyata cukup membantu masyarakat. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, dilakukan pengembangan-pengembangan produk dengan memanfaatkan ampas tahu dan mengembangkan penjual makanan yang kemudian ditambah menjual minuman.

Tahap selanjutnya adalah tahap pembiasaan (*using*). KSM yang ada ketika merencanakan dan membentuk proposal dengan mengadakan pertemuan kelompok, dimana masyarakat yang merencanakan, membuat proposal, mengimplementasikan, memanfaatkan, dan menjaganya. Pengajuan proposal tidak hanya ke BKM, namun masyarakat juga terbiasa mengajukannya ke LPMK, Kelurahan, bahkan ke partai politik. Sehingga tahap pembiasaan ini mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pengurus BKM dalam setiap mengajukan dana untuk kebutuhan KSMnya.<sup>35</sup>

Selanjutnya penelitian kelima dilakukan oleh Diah Wulan Dari mengenai “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kec. Juwana Kab. Pati*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 fungsi manajemen dari G.R Terry meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *actuating* (pengarahan), yang dikolaborasikan dengan 4 tahap proses pemberdayaan Wilson yang meliputi *awakening* (penyadaran), *understanding* (pemahaman), *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (penggunaan).

Adapun tahap perencanaan ADD dalam pemberdayaan pada proses *awakening* (penyadaran) dilihat dari belum maksimalnya upaya penyadaran potensi yang dimiliki masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan ADD sehingga perencanaan pengelolaan ADD masih seputar kegiatan perbaikan dan

---

<sup>35</sup> Yohan Irawan, Nafiqoh, dkk. “*Analisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Masyarakat Kota Malang)*”, 2013.



pembangunan infrastruktur belum ke arah kegiatan yang memberdayakan potensi masyarakat.

Tahap pengorganisasian ADD pada proses *understanding* (pemahaman) dapat dilihat dari penanaman pemahaman akan tugas pokok pelaksanaan ADD yang belum maksimal, seperti dari adanya miskomunikasi antar perangkat desa terkait. Disisi lain dalam pengorganisasian Kepala Desa selaku pimpinan telah mengorganisasikan dengan mengajak masyarakat aktif membantu kegiatan pembangunan, dan berpartisipasi dalam rapat lingkungan atau rapat RT/RW.

Kemudian pemerintah Desa Margomulyo dalam tahap pengarahan (*actuating*) pelaksanaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, telah sampai pada proses *harnessing* (pemanfaatan) potensi SDM masyarakat yang dimiliki, hal ini dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan ADD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berusaha menjadi suri tauladan yang baik dengan bekerja secara jujur, ikhlas, dan adil.

Masyarakat Desa Margomulyo dalam Tahap pengawasan penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat ini telah sampai pada proses *using* (penggunaan) potensi yang dimiliki, hal ini dilihat dari adanya terbukanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung. Namun, disisi lain transparansi dan akuntabilitas sistem pelaporan masih belum maksimal. Masyarakat masih belum mendapatkan laporan penggunaan Keuangan Desa baik dalam bentuk banner,

papan infografis, maupun selebaran fotokopi laporan. Laporan penggunaan hanya disampaikan melalui RT dan RW.<sup>36</sup>

Adapun sebagaimana literatur di atas, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan proses dari konsep pemberdayaan Wilson tersebut. Selain itu, pada penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang objek kajiannya adalah KWT Cemara Hijau *Farm* Kelurahan Karangbesuki ini, peneliti memfokuskan dalam hal mengetahui dan memahami akan tingkat dari keberpengaruhan adanya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terdapat di Kota Malang terhadap perbaikan aspek ekonomi/pendapatan dari kelompok masyarakat pengelola bantuan program tersebut dalam upayanya menunjang kegiatan ekonomi keluarga.

## **2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan strategi pembangunan. Dalam strategi pembangunan ini, disadari pentingnya kapasitas manusia (masyarakat) dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi.<sup>37</sup> Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu dan merubah kehidupan masyarakat untuk memperoleh daya guna dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan atau langkah yang akan dilakukan.

---

<sup>36</sup> Diah Wulan Dari, *Skripsi: "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kec. Juwana Kab. Pati"* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018)

<sup>37</sup> Mardikanto, Totok dan Soebianto, *Loc. Cit.*

Chambers mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”.<sup>38</sup> Maka kemudian, pemberdayaan dimaknai sebagai kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, yang secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif.<sup>39</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Friedmann juga menyatakan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan sumberdaya pribadi, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.<sup>40</sup> Pada konsep pemberdayaan ini mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. Sebagaimana menurut Alfitri bahwa paradigma pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa yang berakar dari bawah.<sup>41</sup>

Adapun secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sejalan dengan pengertian tersebut, pemberdayaan menurut Huraerah berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*”, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>39</sup> Suhendra, K. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 74-75

<sup>40</sup> Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho, *Loc.Cit.*

<sup>41</sup> Alfitri, *Loc.Cit.*

“*pemberkuasaan*”, dalam arti pemberian atau peningkatan “*kekuasaan*” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung atau *disadvantaged*.<sup>42</sup> Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya (*disadvantaged*).<sup>43</sup> John Ife kemudian memperjelas bahwa pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.<sup>44</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai sesuatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Terlebih penting pemberdayaan menurut Wilson dimaknai sebagai sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Akan tetapi merupakan suatu cara atau filosofi dimana dalam pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82

<sup>43</sup> Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 77

<sup>44</sup> Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 49

<sup>45</sup> Bambang Sugeng Dwiyanto, dan Jemadi. “*Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan*”, *Vol. 3 Nomor 1*, 2013, hal. 41

Sejatinya paradigma akan pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai isu sentral ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan dan terselesaikan terutama antara masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil, termarginalkan dan terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan, artinya pemberdayaan merupakan proses dari, oleh dan untuk masyarakat, dimana masyarakat diberikan stimulus untuk bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dicermati dari serangkaian literatur tentang konsep pemberdayaan masyarakat maka konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat, oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar keinginan untuk berubah kearah lebih baik yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dimana pada prosesnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan yang kemudian didukung dengan peranan aktif partisipatif dari masyarakat.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa

yang mereka lakukan.<sup>46</sup> Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Sejalan dengan itu, Agus Safei juga menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang.<sup>47</sup> Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat *horizon* pilihan bagi masyarakat. Hal ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.<sup>48</sup> Sedang tujuan pemberdayaan secara lebih rinci dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar.

---

<sup>46</sup> Sulistiyani, *Op.Cit.*, hal. 80

<sup>47</sup> Ahmad Safei, Agus. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), hal. 70

<sup>48</sup> Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005), hal. 57

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan kembangnya semangat belajar tersebut, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama terkait aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

5. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

7. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial).

8. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>49</sup>

Sejalan dengan itu Wilson mengemukakan tujuan pemberdayaan dilihat berdasarkan indikator dari adanya pemberdayaan dalam organisasi dimana pada intinya adalah: reputasi, fokus manajemen, manajemen pemberdayaan, atmosfir, kepemimpinan, mengeluarkan kesanggupan masyarakat, pengakuan dan penghargaan, inovasi, kepercayaan, *teamwork*, pengambilan dan pengendalian keputusan, komunikasi, masyarakat, struktur dan prosedur, dan tujuan organisasi.<sup>50</sup>

**c. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Arthur Durham setidaknya ada 3 klasifikasi *Community Development*, yaitu: *Development for Community*, *Development with Community*, dan *Development of Community*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Mardikanto, *Op.Cit.*, hal. 109-112

<sup>50</sup> Sumaryadi, I. Nyoman. *Op.Cit.*, hal. 122-128

<sup>51</sup> Ryan, Blasius. *Thesis: "Analisa Implementasi Program Corporate Social Responsibility Sekolah Athalia (Studi Kasus Pada Program Sekolah Gratis Pinus)"*, Bachelor Thesis, Universitas Multimedia Nusantara. 2016, hal. 53



1. *Development for Community*, adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat pada posisi sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu, inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh aktor dari luar. Pendekatan seperti ini relevan dilakukan pada masyarakat yang kesadaran dan budayanya terdominasi. Namun berbagai temuan lapangan memperlihatkan bahwa *development for community* akan sangat mudah menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar.

2. *Development with Community*, adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi antar aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. Bentuk *community development* ini adaah yang paling banyak diaplikasikan oleh berbagai pihak. Dasar pemikiran bentuk *community development* ini adalah perlunya sinergi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan yang dikuasai oleh aktor luar. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap inisiatif pembangunan yang ada sekaligus membuat proyek pembangunan menjadi lebih efesien.

3. *Development of Community*, adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sendiri sebagai agen pembangunan sehingga inistif, perencanaan, dan pelaksanaan dilakukan sendiri

oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pemilik dari proses pembangunan. Peran aktor luar dalam kondisi ini adalah sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan.

Lebih lanjut Arthur Dunham mengemukakan 4 unsur *Community Development* sebagai berikut:

1. *A plan program with a focus on the total needs of the village community* (Rencana program yang memfokuskan pada kebutuhan masyarakat lokal sepenuhnya)
2. *Technical assistance* (Bantuan secara teknis)
3. *Integrating various specialities for the help of community* (Berbagai bidang yang terintegrasi untuk membantu komunitas)
4. *A major emphasis upon self-help and participation by the resident of the community* (Penekanan utama pada kemandirian dan peran serta para penduduk dalam suatu komunitas).<sup>52</sup>

#### **d. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam proses pemberdayaan penerapan prinsip merupakan hal yang penting untuk ditekankan, terkait prinsip pemberdayaan ini Mathews mengatakan bahwa prinsip pemberdayaan merupakan suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.<sup>53</sup> Oleh karena itu, prinsip akan berlaku umum, artinya dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam.

---

<sup>52</sup> Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 219

<sup>53</sup> Mardikanto, Totok dan Soebianto, *Op.Cit.*, hal. 105

John Ife juga menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip *holisme*, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan.<sup>54</sup> Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sunit Agus Tri Cahyono juga mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal.
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial.
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal.
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja.
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek.
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan.<sup>55</sup>

Selain itu Rubin juga mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Hairi Firmansyah, "*Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdaaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut*", Vol. 02 Nomor 1, Maret 2012, hal 55

<sup>55</sup> Agus Tricahyono, Sunit. *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT* (Yogyakarta: B2P3KS, 2008), hal. 14

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.<sup>56</sup>

Penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan *facilitating factors*, yakni kelompok masyarakat yang dinamis (*group dynamics*) dan *stakeholder* atau pendamping/fasilitator yang kompeten. Hal ini perlu

---

<sup>56</sup> Sumaryadi, I. Nyoman. *Op.Cit.*, hal. 94-96

dikemukakan karena sifat dasar dari setiap program pemberdayaan masyarakat senantiasa membutuhkan peran pihak luar (fasilitator) sebagai faktor eksternal dan kedinamisan kelompok sosial sebagai faktor internal.

**e. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai proses pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu proses saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ketahapan berikutnya.

Adapun berkaitan dengan itu, pemberdayaan dalam prosesnya dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan yaitu:

- 1) *Penyadaran (Awakening)*, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik dan efektif,
- 2) *Pemahaman (Understanding)*, pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya,
- 3) *Memanfaatkan (Harnessing)*, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka

memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya,

- 4) Menggunakan (*Using*) keterampilan dan kemampuan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.<sup>57</sup>

Adapun pemberdayaan sebagai proses yang menyeluruh menurut Sri Kuntari menekankan pada proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>58</sup>

Maka kemudian dalam proses pemberdayaan diperlukan peranan dari fasilitator serta suatu tim penyuluh/pendamping dalam rangka menstimulus kegiatan pemberdayaan yang efektif dan efisien, sebagaimana menurut Tim Delivery yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat mestinya didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat.<sup>59</sup>

Lebih dari itu, terkait dipilihnya teori dari proses pemberdayaan Wilson sebagai alat analisis dalam penelitian ini, yang didalamnya proses tersebut meliputi proses penyadaran (*awakening*), pemahaman (*understanding*), pemanfaatan (*harnessing*) dan penggunaan (*using*)

---

<sup>57</sup> Sumaryadi, I. Nyoman. *Op.Cit.*, hal. 130

<sup>58</sup> Kuntari, Sri. *Strategi Pemberdayaan Quality Growth dalam Melawan Kemiskinan* (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2009), hal. 12

<sup>59</sup> Mardikanto, *Op.Cit.*, hal. 46

dikarenakan teori proses tersebut dianggap oleh peneliti lebih sesuai dengan kajian yang akan diteliti.

## 2.3 Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*)

### a. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Sejatinya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tidak bisa lepas dari *urban farming* baik secara konsep maupun pelaksanaannya. Bisa dikatakan bahwasanya KRPL merupakan pengejawantahan dari *urban farming* versi Indonesia. Adapun *urban farming* atau sering disebut dengan pertanian perkotaan dipahami sebagai suatu kegiatan bertani dengan memanfaatkan baik lahan maupun ruang sempit untuk memproduksi hasil pertanian di wilayah perkotaan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan suatu kawasan dan memiliki *multiplier effect on economy*.<sup>60</sup>

Sedangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan konsep lingkungan perumahan penduduk yang mengusahakan pekarangannya secara bersama-sama dan intensif untuk kesejahteraan.<sup>61</sup> Program KRPL merupakan kegiatan yang mendorong warga untuk mengembangkan tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman obat, maupun peternakan dan perikanan skala kecil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah.<sup>62</sup> Lebih dari itu, program KRPL merupakan aktifitas pertanian didalam atau disekitar kota yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan bagi

---

<sup>60</sup> Nadia Belinda, dan Dian Rahmawati, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Pertanian, *Loc. Cit*

<sup>62</sup> Badan Litbang Pertanian, *Loc. Cit.*

masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan, lahan-lahan kosong, guna menambah gizi, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>63</sup>

Jac Smit dan Joe Nasr berpendapat bahwa pertanian perkotaan atau berdasarkan versi mereka disebut *urban agriculture* dapat didefinisikan sebagai aktifitas budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan, produk kehutanan dan hortikultura yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan.<sup>64</sup> Dalam hal ini *urban farming* atau KRPL diartikan sebagai konsep pembangunan yang menyangkut aspek ketahanan pangan, sosial, ekologi/lingkungan dan juga ekonomi. Oleh karena itu, tujuan pertanian perkotaan dengan berbagai konsep yang ada menurut Dick Foeken dan Alice Mboganie adalah sebagai sarana untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan atau pendapatan, atau juga sebagai suatu aktifitas yang menimbulkan kesenangan (rekreasi) dan relaksasi bagi pelakunya.<sup>65</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, *urban farming* yang ada di Indonesia menurut versi buku *Urban Farming Ala Indonesia Berkebun* mengatakan didasari oleh tiga nilai utama. Pertama, nilai ekologi yang dapat menghidjaukan ruang-ruang negatif yang tidak terpakai. Kedua, nilai ekonomi yang harapannya *urban farming* dapat menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan *sustainable* seperti di negara Kuba. Ketiga, sisi edukasi dan interaksi sosial. Harapannya, adanya jejaring di berbagai kota agar

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Yudi Sastro, *Loc.Cit.*

<sup>65</sup> *Ibid.*



kekuatan *urban farming* lahir dari gagasan dan inisiatif masyarakat di kota mereka sendiri.<sup>66</sup>

Adapun penerapan *urban farming* dengan berbagai konsep yang ada seperti KRPL ini merupakan salah satu solusi alternatif untuk meminimalisir gejala-gejala permasalahan yang terjadi di perkotaan seperti keterbatasan lahan, kurang gizi, pengangguran, kepadatan penduduk, pengentasan masalah ekonomi dan masalah ketahanan pangan. Pada bagian ini, Jac Smit dan Joe Nasr juga mengatakan bahwa pertanian perkotaan merupakan suatu “*industri*” yang merespon kebutuhan harian seluruh masyarakat kota. Sebagai suatu industri, pertanian perkotaan memiliki dua perspektif utama, yakni perspektif sumberdaya dan ekonomi.<sup>67</sup> Oleh karena itu optimalisasi akan penggunaan sumberdaya seperti air dan lahan, tenaga kerja, sarana-prasarana, merupakan suatu keharusan untuk dilakukan dalam upaya memperoleh keuntungan yang optimal secara ekonomi.

#### **b. Pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam pelaksanaannya melibatkan rumah tangga dan saling terkait yaitu berbasis Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), dusun (kampung), desa, kelurahan, atau wilayah lain yang memungkinkan. Adapun kumpulan rumah tangga/masyarakat tersebut diwadahi dalam sebuah kelompok usaha yang dikenal dengan Kelompok Tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT).

Sedangkan prinsip dan tujuan dari program KRPL antara lain :

---

<sup>66</sup> Indonesia Berkebun. *Urban Farming Ala Indonesia Berkebun* (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2015), hal. 13

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 30

Prinsip dasar KRPL adalah 1) Pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, 2) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, 3) Konservasi sumber daya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), 4) Menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju, 5) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>68</sup> Sedang tujuan KRPL adalah :

- a) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari.
- b) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun di perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga, pemeliharaan ternak dan ikan serta diversifikasi pangan.
- c) Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan.
- d) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.<sup>69</sup>

Adapun *urban farming* di Indonesia dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa

---

<sup>68</sup> Badan Litbang Pertanian. *Loc.Cit.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

*stakeholders* yang terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, dan Pendamping Lapangan/Kelompok yang berperan sebagai stimulan keberhasilan berjalannya program.

#### **2.4 Dasar Hukum Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Sejatinya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pertanian perkotaan, menjaga ketahanan pangan, peningkatan perekonomian, dan terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat. Gagasan program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang dimana pada pengimplementasiannya mengutamakan aspek optimalisasi lahan pekarangan untuk mengembangkan tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman obat, maupun peternakan dan perikanan skala kecil guna menambah gizi, meningkatkan dan atau menunjang ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.